

**LAPORAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG PALOPO**

Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2023

(Audited)

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual, sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang Palopo. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palopo, 13 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik
Nafan Widiarso Rafid





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI SELATAN, TENGGARA, DAN BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO

Jalan Andi Kambo No.55 Palopo 91921
Telp. (0471) 22607, 32750; Faks. (0471) 21360; Email kpknlpalopo@kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palopo, 13 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik
Naf'an Widiarso Rafid



Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo Periode Tanggal 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Periode Tanggal 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 3.017.376.573, atau sebesar 127% dari target PNBPN sebesar Rp2.374.681.000.

Realisasi Belanja Negara pada Periode Tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.414.186.030 atau mencapai 94% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.496.611.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023 dan 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 3.959.322.004 dan Rp4.098.772.772 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp70.541.342 dan Rp164.974.554; Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.888.780.662 dan Rp3.933.798.218; dan Aset Lainnya (neto) masing-masing sebesar Rp0.

Kemudian nilai Kewajiban pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp59.420.816, dan Rp163.015.633, yang semua komponennya terdiri dari jumlah kewajiban jangka pendek, dan Ekuitas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.899.901.188, dan Rp3.935.757.139.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.012.528.088 dan 2.426.939.191, sedangkan jumlah beban sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.683.351.910 dan Rp1.646.372.512, sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.329.176.178 dan Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp1.329.176.178.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada awal periode adalah sebesar Rp3.935.757.139 ditambah Surplus-LO sebesar Rp1.329.176.178, kemudian dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.388.072.129, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp3.899.901.188.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode Tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.374.681.000	3.017.376.573	127,06	2.503.962.082
JUMLAH PENDAPATAN		2.374.681.000	3.017.376.573	127,06	2.503.962.082
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	1.353.295.000	1.271.541.230	93,96	1.216.966.539
Belanja Modal	B.5	143.316.000	142.644.800	99,53	
Belanja Bantuan Sosial	B.6			-	-
JUMLAH BELANJA		1.496.611.000	1.414.186.030	94,49	1.216.966.539

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO NERACA

PER 31 Desember 2023 dan 2022

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	50.471.382	152.316.409
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.4	-	4.848.485
Persediaan	C.5	20.069.960	7.809.660
Jumlah Aset Lancar		70.541.342	164.974.554
ASET TETAP			
Tanah	C.6	1.592.178.000	1.569.138.000
Peralatan dan Mesin	C.7	3.834.863.349	3.492.195.719
Gedung dan Bangunan	C.8	1.601.299.988	1.601.299.988
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(3.139.560.675)	(2.728.835.489)
Jumlah Aset Tetap		3.888.780.662	3.933.798.218
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.10	-	-
Aset Lain-Lain	C.11	235.450.000	208.800.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(235.450.000)	(208.800.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		3.959.322.004	4.098.772.772
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.13	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	59.420.816	163.015.633
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		59.420.816	163.015.633
JUMLAH KEWAJIBAN		59.420.816	163.015.633
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.15	3.899.901.188	3.935.757.139
JUMLAH EKUITAS DANA		3.899.901.188	3.935.757.139
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.959.322.004	4.098.772.772

III. LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.012.528.088	2.426.939.191
JUMLAH PENDAPATAN	3.012.528.088	2.426.939.191
BEBAN		
Beban Pegawai	-	-
Beban Persediaan	27.720.700	37.936.629
Beban Barang dan Jasa	789.537.174	824.999.520
Beban Pemeliharaan	180.287.951	194.926.970
Beban Perjalanan Dinas	259.985.315	167.739.273
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
Beban Bantuan Sosial		-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	425.820.770	420.770.120
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-
JUMLAH BEBAN	1.683.351.910	1.646.372.512
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	1.329.176.178	780.566.679
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan dari Kegiatan Operasional Lainnya	-	80.779.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-
Defisit Selisih Kurs	-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	80.779.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	1.329.176.178	861.345.679
POS LUAR BIASA		
Pendapatan PNB	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-
Beban Persediaan	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	1.329.176.178	861.345.679

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	3.935.757.139	4.285.605.128
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	1.329.176.178	861.345.679
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN			-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3		-
PENYESUAIAN NILAI KEWAJIBAN	E.4		-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.5		-
LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.6		
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.7		
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.8	23.040.000	
KOREKSI ATAS BEBAN	E.9	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.10	-	-
Jumlah Lain-Lain		23.040.000	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		(1.388.072.129)	(1.211.193.688)
KENAIKAN(PENURUNAN) EKUITAS		(35.855.951)	(349.847.989)
EKUITAS AKHIR	E.11	3.899.901.188	3.935.757.139

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palopo terbentuk pada tahun 2005 dengan nama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Palopo. Pada tahun 2006, terjadi reorganisasi dengan adanya perubahan nomenklatur dari DJPLN menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Perubahan tersebut juga mengakibatkan berubahnya nomenklatur KP2LN Palopo menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palopo. KPKNL Palopo merupakan instansi vertikal DJKN di bawah Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat.

Saat ini KPKNL Palopo menempati gedung milik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo yang beralamat di Jalan Andi Kambo Nomor 55 Palopo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Palopo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. KPKNL Palopo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;

2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Wilayah kerja KPKNL Palopo meliputi 7 (tujuh) kota dan/atau kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Enrekang. Dalam menjalankan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, KPKNL Palopo memberikan pelayanan terkait kekayaan negara dan lelang kepada 192 (seratus sembilan puluh dua) satuan kerja. KPKNL Palopo selalu menjunjung tinggi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pengguna layanan.

Sebagai kantor pelayanan, KPKNL Palopo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selalu berusaha meningkatkan kepuasan dan kepercayaan para pengguna jasa layanan serta mendukung tercapainya visi dan misi DJKN sesuai Renstra Tahun 2020-2024 yakni Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, KPKNL Palopo sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai Misi mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dalam usaha mewujudkan visi dan misi yang diemban, KPKNL Palopo mempunyai motto “IDAMAN” yang merupakan singkatan dari “Ikhlas dan Andal Dalam Melayani”.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode Tanggal 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo. Laporan Keuangan ini dihasilkan

melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan

Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu Bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu Bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	a. Satu Bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	b. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) Bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) Bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) Bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan

sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas Bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas Bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2023	
	ANGGARAN	ANGGARAN
	AWAL	SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Bea Lelang	993.000.000	993.000.000
Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara	1.348.000.000	1.348.000.000
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.181.000	2.181.000
Pendapatan Jasa Lainnya	31.500.000	31.500.000
Jumlah Pendapatan	2.374.681.000	2.374.681.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	-
Belanja Barang	1.332.108.000	1.353.295.000
Belanja Modal	143.316.000	143.316.000
Jumlah Belanja	1.475.424.000	1.496.611.000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp3.017.376.573*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.017.376.573, dengan estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.374.681.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Bea Lelang	993.000.000	938.264.286	94,49
Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara	2.181.000	541.586	24,83
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.348.000.000	2.076.522.292	154,04
Pendapatan Jasa Lainnya	-	500.000	-
Pendapatan Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
Pendapatan Sewa tanah,gedung dan bangunan	3.500.000		-
Pendapatan Penyeteroran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil		3.409	
Pendapatan anggaran lain-lain	-	1.545.000	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	21.000.000		
Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya	7.000.000		-
Pendapatan Lain-lain	-		-
Jumlah	2.374.681.000	3.017.376.573	127,06

B.2 Belanja

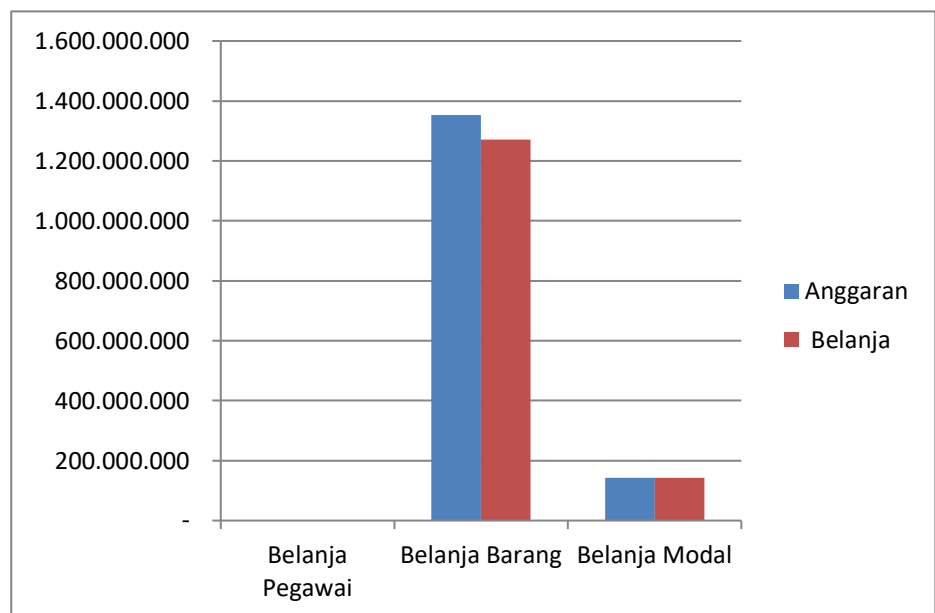
*Realisasi Belanja
Negara
Rp1.414.186.030*

Realisasi Belanja instansi pada untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.414.186.030. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran
2023*

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.353.295.000	1.271.541.230	93,96
Belanja Modal	143.316.000	142.644.800	99,53
Total Belanja Kotor	1.496.611.000	1.414.186.030	94,49
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	1.496.611.000	1.414.186.030	94,49

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 16,21% dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2023 terdapat anggaran belanja modal dan tambahan dana pada Risalah lelang UMKM dan Sertifikasi sebagai proyek unggulan DJKN.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang	1.271.541.230	1.216.966.539	4,48
Belanja Modal	142.644.800	-	#DIV/0!
Jumlah	1.414.186.030	1.216.966.539	16,21

Belanja Pegawai

Rp 0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2023 tidak ada dikarenakan belanja pegawai dianggarkan secara terpusat.

Belanja Barang

Rp1.271.541.230

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode 31 Desember Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.271.541.230 dan Rp1.216.966.539. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,48% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	671.340.417	704.501.606	(4,71)
Belanja Barang Non Operasional	14.509.500	10.084.000	43,89
Belanja Jasa	105.437.047	97.727.130	7,89
Belanja Pemeliharaan	180.287.951	195.282.530	(7,68)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	259.985.315	169.371.273	53,50
Belanja Barang Persediaan	39.981.000	40.000.000	-
Jumlah Belanja Kotor	1.271.541.230	1.216.966.539	4,48
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.271.541.230	1.216.966.539	4,48

Belanja Modal
Rp142.644.800

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode 31 Desember Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp142.644.800 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu karena KPKNL Palopo di tahun lalu tidak mendapat anggaran untuk belanja modal. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat pembelian untuk peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023

URAIAN	T.A 2023	TA.2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.644.800	0	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	142.644.800	0	100,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	142.644.800	0	100,00

B.5.1 Belanja Perangkat Data dan Pengolah Informasi

Realisasi Belanja Perangkat Data dan Pengolah Informasi TA 2023 adalah sebesar Rp50.040.000, mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar 0. Hal ini anggaran yang juga naik signifikan dengan adanya pengadaan printer dan scanner pada tahun 2023.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp92.604.800, mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp0. Hal ini anggaran yang juga naik signifikan dengan adanya pembelian kendaraan roda dua dan pembelian inventaris kantor pada tahun 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	50.040.000	0
Peralatan dan Mesin dan inventaris	92.604.800	0
Jumlah Belanja Kotor	142.644.800	0
Pengembalian	-	-
Jumlah Belanja	142.644.800	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca sudah nihil. Dengan kata lain masih terdapat saldo

baik itu UP/TUP pada Brankas dan saldo di Bank. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Uang Tunai di Brankas	-	-
Saldo di Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TH 2023	THN 2022
Saldo di Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp50.471.382*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp50.471.382 dan Rp152.316.409

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3

Bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan serta kas pada bendahara penerimaan yang bukan berasal dari setoran bea lelang dan biad yang belum disetor. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	50.471.382	152.316.409
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	50.471.382	152.316.409

Persediaan

Rp20.069.960

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 20.069.960 dan Rp7.809.660.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	TH 2023	TH 2022
Barang Konsumsi	20.069.960	7.809.660
Bahan untuk pemeliharaan		
Pita Cukai, materai, dan Leges	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	20.069.960	7.809.660

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan terjadinya penambahan nilai persediaan karena pada akhir Agustus 2023 dilakukannya pembelian barang konsumsi.

Tanah

Rp1.592.178.000

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.592.178.000 dan Rp1.569.138.000. Nilai aset tetap berupa tanah mengalami perubahan karena ada koreksi salah pencatatan luas dan nilai tanah di Jalan Pongsimpin.

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	740 m ²	Jl. Ahmad Razak	1.062.270.000
2	431 m ²	Jl. Pongsimpin	331.008.000
3	200 m ²	Jl. Lagaligo	198.900.000
Jumlah			1.592.178.000

Peralatan dan

Mesin

Rp3.834.863.349

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp3.834.863.349 dan Rp3.492.195.719. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023		3.492.195.719
Mutasi tambah:		578.117.630
Pembelian		142.644.800
Transfer Masuk		435.472.830
Mutasi kurang:		(235.450.000)
Reklasifikasi Keluar		-
Penghentian dari Penggunaan		(235.450.000)
Saldo per 31 Desember 2023		3.834.863.349
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023		(2.944.325.891)
Nilai Buku per 31 Desember 2023		890.537.458

Mutasi penambahan peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian terdiri dari 1 unit Sepeda Motor, 3 unit Lemari Besi/Metal, 4 unit Kursi Besi/Metal, 1 unit Sice, 1 unit Meja Rapat, 2 unit Meja Makan Kayu, 4 unit Meubelair Lainnya, 1 unit Televisi, 1 unit Karpet, 1 unit Tempat Sampah, 2 unit

Microphone/Wireless MIC, 1 unit Mixer Sound Sistem, 4 unit Printer (Peralatan Personal Komputer), dan 2 unit Scanner (Peralatan Personal Komputer).

Mutasi penambahan peralatan dan mesin yang berasal dari transfer masuk terdiri dari dropping 1 unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke bawah), 2 unit Laptop, 1 unit LCD Monitor, dan 1 unit Bracket Standing Peralatan, 1 Unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 1 unit CAT 6 Cable, 6 unit Wireless Access Point, 1 Unit Switch, dan 6 unit Peralatan Jaringan Lainnya dari Kantor Pusat

*Gedung dan
Bangunan
Rp1.601.299.988*

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.601.299.988 dan Rp1.601.299.988. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.601.299.988
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 September 2023	1.601.299.988
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	178.294.238
Nilai Buku per 30 September 2023	1.423.005.750

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp3.139.560.675*

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp3.139.560.675 dan Rp2.728.835.489. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap

yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.834.863.349	2.944.325.891	890.537.458
2	Gedung dan Bangunan	1.601.299.988	195.234.784	1.406.065.204
Jumlah		5.436.163.337	3.139.560.675	2.296.602.662

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Aset Lain-Lain
Rp0*

C.9 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	-
Mutasi tambah:	
Aset Lain-lain	235.450.000
Mutasi kurang:	
- reklasifikasi ke aset tetap	-
Saldo per 31 Desember 2023	235.450.000
Akumulasi Penyusutan	(235.450.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0*

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra

akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya serta adanya normalisasi aset.

*Utang kepada Pihak Ketiga
Rp59.420.816*

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp59.420.816 dan Rp163.015.633. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas Bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Hak Penyerah Piutang yang belum dipindahbukukan ke Penyerah Piutang		
Uang Jaminan Lelang yang Belum diambil		
Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi (Pihak Ketiga)	50.000.000	
Hasil Bersih Lelang yang belum di transfer ke pihak yang berhak	-	
Kelebihan di Rekening Penampung Lelang		
Kelebihan di Rekening Penampung Piutang		
Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan non eksekusi wajib milik kementerian/lembaga yang belum di transfer		
Pph yang belum disetorkan	-	
Lain-lain Lelang	471.382	
Lain-lain Piutang		
Tagihan Kartu Kredit	-	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	8.949.434	
Total	59.420.816	

*Ekuitas
Rp3.899.901.188*

C.12 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 3.899.901.188 dan Rp3.935.757.139. Ekuitas adalah

kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp3.012.528.088

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.012.5288.088 dan Rp2.426.939.191. Pendapatan utama KPKNL Palopo Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Bea Lelang ,Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, dan Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara. Sementara pendapatan lainnya terdiri dari Pendapatan Anggaran Lain-lain, Pendapatan dari Pemindahtangan BMN, Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Lelang yang tidak diambil oleh yang berhak, dan Pendapatan Jasa Lainnya.

Beban Pegawai

Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Periode Tanggal 31 Desember 2023

Uraian Jenis Beban	TH 2022	TH 2021	Naik (Turun) %
Beban Gaji	-	-	#DIV/0!
Beban Tunjangan-tunjangan	-	-	
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	
Beban Lembur	-	-	0,00
Jumlah	-	-	#DIV/0!

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp27.720.700*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp27.720.700 dan Rp37.936.629. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Periode Tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Periode Tanggal 31 Desember
2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	27.720.700	37.936.629	(26,93)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan		0	-
Jumlah Beban Persediaan	27.720.700	37.936.629	(26,93)

*Beban Barang
dan Jasa
Rp789.537.174*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp789.537.174 dan Rp824.639.520. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa

konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode Tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Periode Tanggal 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	669.811.917	703.327.146	-4,77
Beban Langganan Daya dan Jasa	104.459.257	106.514.374	-1,93
Beban Jasa Pos dan Giro	15.266.000	14.798.000	
Beban Jasa Konsultan	0	0	-
Beban Jasa Profesi	0	0	-
Beban Jasa Lainnya	0	0	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	-
Jumlah	789.537.174	824.639.520	-4,26

Beban Pemeliharaan Rp180.287.951

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp180.287.951 dan Rp194.926.970. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Periode Tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Periode Tanggal 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	31.413.644	49.724.680	-36,82
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	148.874.307	145.202.290	2,53
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	180.287.951	194.926.970	-7,51

*Beban
Perjalanan Dinas
Rp259.985.315*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp259.985.315 dan Rp167.739.273. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode Tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Periode Tanggal 31
Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	251.713.315	149.587.273	68,27
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.272.000	18.152.000	-54,43
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		0	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		0	-
Jumlah	259.985.315	167.739.273	54,99

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp425.820.770*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp425.820.770 dan Rp420.770.120. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode Tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode Tanggal
31 Desember 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	393.867.674	390.745.019	0,80%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.953.096	30.025.101	6,42%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan		-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	-
Jumlah Penyusutan	425.820.770	420.770.120	1,20%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	425.820.770	420.770.120	1,20%

*Surplus
Pelepasan Aset
Non Lancar Rp0*

D.8 Surplus Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari penjualan BMN sebesar Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp3.935.757.139*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.935.757.139 dan Rp4.285.605.128.

*Surplus LO
Rp 1.329.176.178*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 1.329.176.178 dan Rp 861.345.679. Surplus LO merupakan selisih tambah antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian
Nilai Tahun
Berjalan Rp0*

E.3 Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan

Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan Merupakan Penyesuaian Nilai persediaan sebesar Rp0.

*Transaksi antar
Entitas
Rp1.388.072.129*

E.4 Transaksi antar Entitas

Transaksi antar Entitas Merupakan Penyesuaian Nilai entitas sebesar Rp1.388.072.129.

*Ekuitas Akhir
Rp3.899.901.188*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.899.901.188 dan Rp 3.935.757.139.

F. PENGUNGKAPAN KEJADIAN PENTING.

- 1) Selama Tahun Anggaran 2023, KPKNL Palopo berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi sebesar 114,13.
- 2) Terdapat perbedaan nilai luas tanah antara nilai luas di sertifikat dengan aplikasi SIMAN dan SAKTI, sehingga nilai buku tanah mengalami perubahan.
- 3) KPKNL Palopo mendapatkan satu Rincian Output pada tematik APBN dengan rincian sebagai berikut.

No	Program Prioritas/Tematik APBN	Pagu (Rp)	Realisasi(Rp)	%	Satuan RO	Target	Capaian RO	%
1.	Risalah Lelang UMKM	40.000.000	28.806.000	72.02	Risalah UMKM	20	30	150

**LAMPIRAN LAPORAN
KEUANGAN CETAKAN
E-REKON**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO 119944

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 6:30 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	1,496,611,000	1,414,186,030	(82,424,970)	94	1,221,845,000	1,216,966,539	(4,878,461)	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

PALOPO, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAF'AN WIDIARSO RAFID
197408071995031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (119944) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 6:30 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,012,528,088	2,426,939,191	585,588,897	24.129
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,012,528,088	2,426,939,191	585,588,897	24.129
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,012,528,088	2,426,939,191	585,588,897	24.129
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	27,720,700	37,936,629	(10,215,929)	(26.929)
Beban Barang dan Jasa	789,537,174	824,999,520	(35,462,346)	(4.298)
Beban Pemeliharaan	180,287,951	194,926,970	(14,639,019)	(7.51)
Beban Perjalanan Dinas	259,985,315	167,739,273	92,246,042	54.994
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (119944) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 6:30 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	425,820,770	420,770,120	5,050,650	1.2
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,683,351,910	1,646,372,512	36,979,398	2.246
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	1,329,176,178	780,566,679	548,609,499	70.283
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	80,779,000	(80,779,000)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	80,779,000	(80,779,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	80,779,000	(80,779,000)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	1,329,176,178	861,345,679	467,830,499	54.314
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	1,329,176,178	861,345,679	467,830,499	54.314

Keterangan :

FINAL

PALOPO, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAF'AN WIDIARSO RAFID
197408071995031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (119944) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALOPO

Tgl Data : 13/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 13/05/24 6:30 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,935,757,139	4,285,605,128	(349,847,989)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	1,329,176,178	861,345,679	467,830,499	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	23,040,000	0	23,040,000	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	23,040,000	0	23,040,000	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1,388,072,129)	(1,211,193,668)	(176,878,461)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(35,855,951)	(349,847,989)	313,992,038	-
EKUITAS AKHIR	3,899,901,188	3,935,757,139	(35,855,951)	-

Keterangan :

FINAL

PALOPO, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAF'AN WIDIARSO RAFID
197408071995031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (119944) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALOPO

Tgl Data : 13/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 13/05/24 6:30 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	1,414,186,030
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	3,017,376,573	0
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	952,966,300
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	2,076,522,292
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	541,586
3.0	425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	3,409
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,545,000
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	481,939,980	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,038,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	132,840,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	32,203,320	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	8,319,117	0
3.0	521211	Belanja Bahan	14,509,500	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	39,981,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	95,341,471	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	10,095,576	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	31,413,644	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	148,874,307	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	251,713,315	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,272,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142,644,800	0
3.1	425782	Pengembalian Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	14,702,014	0
JUMLAH			4,446,264,617	4,446,264,617

Keterangan :

FINAL

PALOPO, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARANNAF'AN WIDIARSO RAFID
197408071995031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (119944) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALOPO

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 6:30 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	50,471,382	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	20,069,960	0
0.0	131111	Tanah	1,592,178,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,834,863,349	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,601,299,988	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,944,325,891
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	195,234,784
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	235,450,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	235,450,000
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	8,949,434
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	50,471,382
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,414,186,030
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,017,376,573	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	215,118,414
0.0	391111	Ekuitas	0	3,935,757,139
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	23,040,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	933,415,801
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	2,076,522,292
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	541,586
3.0	425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	3,409
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,545,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	481,939,980	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,266,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	132,840,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	32,203,320	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	8,319,117	0
3.0	521211	Beban Bahan	14,509,500	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	94,369,239	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	10,090,018	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	31,413,644	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	148,874,307	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	251,713,315	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,272,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	393,867,674	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31,953,096	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	27,720,700	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (119944) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALOPO

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 6:30 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			12,035,061,162	12,035,061,162

Keterangan :

FINAL

PALOPO, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAF'AN WIDIARSO RAFID
197408071995031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (119944) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PALOPO

Tgl Data : 13/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 13/05/24 6:30 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	50,471,382	152,316,409	(101,845,027)	(66.86)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	4,848,485	(4,848,485)	(100.00)
Persediaan	20,069,960	7,809,660	12,260,300	156.99
JUMLAH ASET LANCAR	70,541,342	164,974,554	(94,433,212)	(57.24)
ASET TETAP				
Tanah	1,592,178,000	1,569,138,000	23,040,000	1.47
Peralatan dan Mesin	3,834,863,349	3,492,195,719	342,667,630	9.81
Gedung dan Bangunan	1,601,299,988	1,601,299,988	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,139,560,675)	(2,728,835,489)	(410,725,186)	15.05
JUMLAH ASET TETAP	3,888,780,662	3,933,798,218	(45,017,556)	(1.14)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	235,450,000	208,800,000	26,650,000	12.76
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(235,450,000)	(208,800,000)	(26,650,000)	12.76
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	3,959,322,004	4,098,772,772	(139,450,768)	(3.40)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	59,420,816	163,015,633	(103,594,817)	(63.55)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	59,420,816	163,015,633	(103,594,817)	(63.55)
JUMLAH KEWAJIBAN	59,420,816	163,015,633	(103,594,817)	(63.55)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,899,901,188	3,935,757,139	(35,855,951)	(0.91)
JUMLAH EKUITAS	3,899,901,188	3,935,757,139	(35,855,951)	(0.91)
JUMLAH EKUITAS	3,899,901,188	3,935,757,139	(35,855,951)	(0.91)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,959,322,004	4,098,772,772	(139,450,768)	(3.40)

Keterangan :

FINAL

PALOPO, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAF'AN WIDIARSO RAFID
197408071995031001